

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian



Gambar 1.1 Logo DKI Jakarta
Sumber : Jakarta.go.id

DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia yang menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta dikenal dengan kota metropolitan sebagai pusat dari pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Wilayah administrasi dibawahnya terbagi menjadi 44 kecamatan dan 267 kelurahan (BPS Jakarta, 2017).

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 10.374.235 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,94%. Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2017 adalah 15.663 jiwa setiap 1 km² (BPS DKI Jakarta, 2018).

Jakarta masih menjadi tempat para pendatang atau kaum urban mengadu nasib untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan lebih layak. Sempitnya lapangan pekerjaan di daerah-daerah menjadi faktor pendorong bagi penduduk desa menyerbu Jakarta (InvestorDaily, 2013). Berikut data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di DKI Jakarta pada tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total	%
0-4	481.928	464.027	945.955	9,29%
5-9	435.741	411.376	847.117	8,32%
10-14	373.937	356.706	730.643	7,17%
15-19	346.116	360.434	706.550	6,94%
20-24	418.901	464.982	883.883	8,68%
25-29	524.940	524.826	1.049.766	10,31%
30-34	534.321	509.726	1.044.047	10,25%
35-39	475.756	451.364	927.120	9,10%
40-44	400.602	380.792	781.391	7,67%
45-49	333.996	323.266	657.262	6,45%
50-54	267.070	267.752	534.822	5,25%
55-59	202.998	206.394	409.392	4,02%
60-64	141.660	142.420	284.080	2,79%
65+	177.391	198.502	375.893	3,69%
Jumlah	5.115.357	5.062.567	10.177.924	100%

Sumber : Data Diolah, Jakarta.bps.go.id 2016

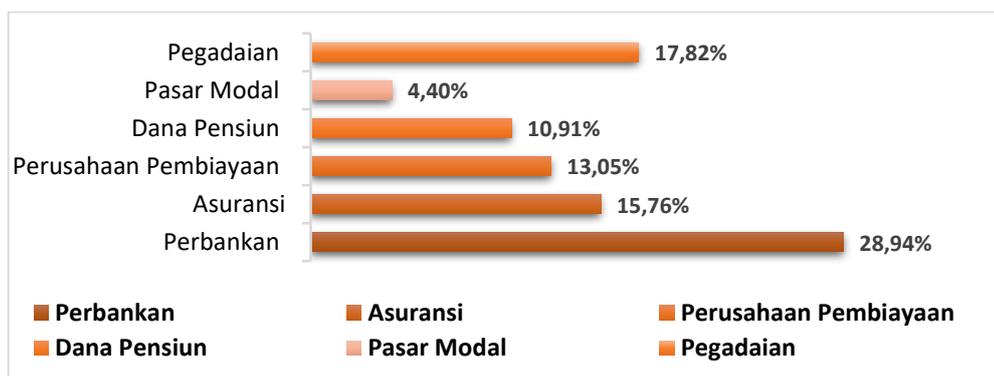
Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penduduk yang mendominasi DKI Jakarta adalah penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun yaitu sebesar 71,46% atau sekitar 7.278.313 jiwa. Menurut BPS DKI Jakarta yang termasuk dalam usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Namun dalam praktiknya sebagian besar ketentuan perusahaan menetapkan usia pensiun sampai umur 55 tahun, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa batasan usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), dan perjanjian kerja bersama (PKB), atau peraturan perundang-undangan (Financial.bisnis.com, 2018). Hal ini juga didukung pada pasal 14 ayat 1 UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyebutkan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun. Sehingga pada penelitian ini menetapkan rentang usia produktif 15-55 tahun yaitu sebesar 64,65% atau sekitar 6.584.841 jiwa.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk mencapai 258,7 juta jiwa. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan pada laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08% setiap tahunnya (BPS DKI Jakarta, 2018). Dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia dan terbesar di ASEAN, komposisi penduduk di Indonesia pada dua dekade yang akan datang di dominasi oleh usia produktif hingga mencapai 70% dari jumlah penduduk. Tingginya jumlah penduduk Indonesia menjadi salah satu aset yang bisa dikembangkan untuk peningkatan perekonomian nasional dengan pemberdayaan masyarakat secara baik dan terstruktur. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Indonesia sangat diuntungkan dengan besarnya penduduk usia produktif yang semakin terpelajar dan melek teknologi (MPSJKI OJK, 2016). Dalam konteks pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan termasuk memperkuat kompetensinya, salah satunya dengan literasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Menurut Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari 29,7% pada tahun 2016 menjadi 38,03% pada tahun 2019. Dari tingkat literasi tersebut, berarti dari setiap 100 penduduk hanya sekitar 38 orang yang termasuk kategori *well literate*. Masyarakat yang *well literate* lebih mudah memahami hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan serta memiliki informasi untuk mengakses industri jasa keuangan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan (OJK, 2019). Pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi *life skill* yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan dalam jangka panjang (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Berikut data literasi keuangan pada berbagai industri keuangan di Indonesia pada tahun 2016:



Gambar 1.2 Grafik Tingkat Literasi Keuangan Pada Berbagai Industri Keuangan di Indonesia Tahun 2016

Sumber : Data Diolah, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan tertinggi terdapat pada sektor perbankan yaitu mencapai 28,94%. Sedangkan paling rendah pada sektor pasar modal yaitu sebesar 4,40%. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat literasi keuangan di Indonesia masih belum merata pada tiap sektor jasa keuangan.

Dengan masih belum meratanya tingkat literasi keuangan pada tiap sektor keuangan, membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan masih rendah. Salah satu bentuk rendahnya tingkat literasi di Indonesia adalah pada penggunaan kartu kredit yang berlebihan. Kartu kredit di Indonesia kini selain sebagai alat pengganti pembayaran, namun juga telah berfungsi sebagai gaya hidup. Alat transaksi non tunai ini menjadi jenis pinjaman atau kredit konsumtif karena memiliki rata-rata bunga sebesar 2,25% per bulan atau 27% per tahun. Jika terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan akan dikenakan bunga yang sangat mahal (Kompas.com, 2016). Berikut data kepemilikan konsumen kartu kredit berdasarkan kota dan kelompok umur:

Tabel 1.2 Kepemilikan Kartu Kredit Berdasarkan Kota dan Kelompok Umur

Tingkat Kepemilikan	Usia			Kota			
	18-30 Tahun	31-40 Tahun	41-55 Tahun	Jakarta	Bandung	Surabaya	Medan
15,9%	13,2%	18,6%	14,5%	22,3%	6%	16,9%	15,6%

Sumber : Data Diolah, Mars Newsletter 2013

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase tingkat kepemilikan kartu kredit di Indonesia sekitar 15,9%. Dengan tingkat kepemilikan kartu kredit tertinggi terdapat di kota Jakarta yaitu 22,3%. Kemudian diikuti kota Surabaya (16,9%), Medan (15,6%) dan Bandung (6%). Jika dilihat dari kelompok umurnya, ketiga kategori tersebut termasuk dalam usia produktif yang jumlah kepemilikan kartu kredit tertinggi terdapat pada kelompok usia 31-40 tahun yaitu sebesar 18,6%, diikuti kelompok usia 41-55 tahun (14,5%) dan 18-30 tahun (13,2%).

Menurut Bank Indonesia, pasar kartu kredit di Indonesia cukup besar yaitu dengan terdapatnya 17 juta kartu kredit yang beredar. Setelah ditelusuri lebih lanjut pemilikinya hanya sekitar 7,5 juta, artinya satu orang bisa memiliki antara 2-3 kartu kredit. Tiga transaksi terbesar penggunaan kartu kredit selama 10 tahun terakhir terdapat pada *grocery*, *retail* dan *departement store*, dan untuk makanan dan minuman (Tribunjateng.com, 2016).

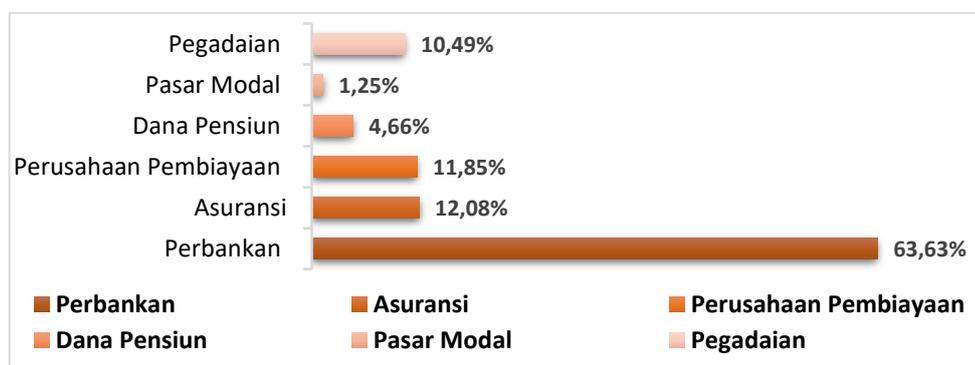
Survei dari *Huffington Post* menunjukkan bahwa milenial Asia lebih sering makan di luar rumah dan mengikuti *trend* yang tengah populer, baik itu dalam *fashion* atau tempat makan yang ‘fotogenik’ hanya untuk mempengaruhi pergaulan sosialnya (Huffingtonpost, 2017). Itu artinya mayoritas masyarakat usia muda tidak peduli lagi mana kebutuhan utama, mana kebutuhan tambahan dan mana kebutuhan untuk jaga gengsi (Kompasiana.com, 2016). Terkadang seseorang membeli sesuatu tidak berdasarkan pada kebutuhan sebenarnya, melainkan dilakukan semata-mata demi kesenangan, sehingga menyebabkan seseorang menjadi boros atau yang biasa dikenal dengan istilah perilaku konsumtif atau konsumerisme (Wahyudi, 2013). Chen & Volpe (1998) mengatakan bahwa mayoritas dari usia muda memiliki tingkat literasi yang rendah karena sedang berada dalam tahap awal kehidupan finansial mereka. Pada tahap ini mereka memiliki masalah mengenai pengetahuan keuangan yang minim, sehingga sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk konsumsi daripada investasi.

Minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan masyarakat Jakarta juga dibuktikan dengan adanya 283 kasus tentang intimidasi *fintech* peminjaman *online* semenjak tahun 2016-2019. Intimidasi tersebut disebabkan para konsumen yang tidak dapat membayar atas pinjaman dana yang telah dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat cenderung menikmati gaya hidup yang lebih tinggi diatas kelasnya sehingga kebanyakan dari mereka menghalalkan segala cara termasuk utang atau meminjamkan uang ke *fintech-fintech* ilegal tanpa memikirkan akibatnya (Cnnindonesia.com, 2018). Intimidasi yang didapatkan oleh para konsumen berupa bunga pinjaman yang tinggi, ancaman melalui penyebaran

konten pornografi yang melecehkan nasabah hingga kekerasan fisik (Tribunnews.com, 2019).

Ketika seseorang memiliki pengetahuan tentang keuangan maka orang tersebut sadar akan manfaat dan penggunaan jasa dari industri keuangan (Bongomin *et al.*, 2016). Hal inilah yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki hubungan dengan inklusi keuangan. Menurut rancangan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 76/POJK.07/2016 bahwa Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan atau layanan jasa keuangan di lembaga jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), 2016). Definisi lain dari inklusi keuangan merupakan jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan (Finansialku.com, 2016).

Indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan indeks literasinya. Indeks inklusi keuangan pada tahun 2016 menunjukkan angka 67,82% masyarakat Indonesia telah mengakses lembaga jasa keuangan formal. Sementara itu, indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 76,19% (OJK, 2019). Berikut data inklusi keuangan pada berbagai industri keuangan di Indonesia pada tahun 2016:

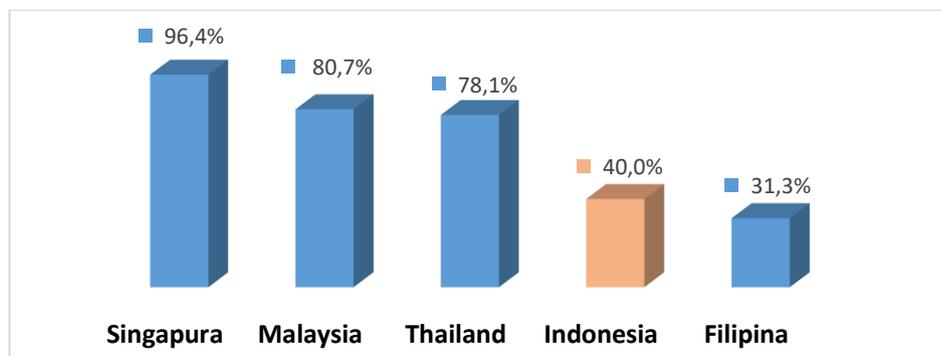


Gambar 1.3 Grafik Tingkat Inklusi Keuangan Pada Berbagai Industri Keuangan di Indonesia Tahun 2016

Sumber : Data Diolah, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan tertinggi terdapat pada sektor perbankan yaitu mencapai 63,63%. Sedangkan paling rendah pada sektor pasar modal yaitu mencapai 1,25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih belum merata pada tiap sektor jasa keuangan.

Jika dilihat dari akses masyarakat terhadap keuangan formal diantara negara anggota ASEAN (Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura), Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat inklusi keuangan yang rendah. Berikut grafik akses masyarakat terhadap keuangan formal di Indonesia:



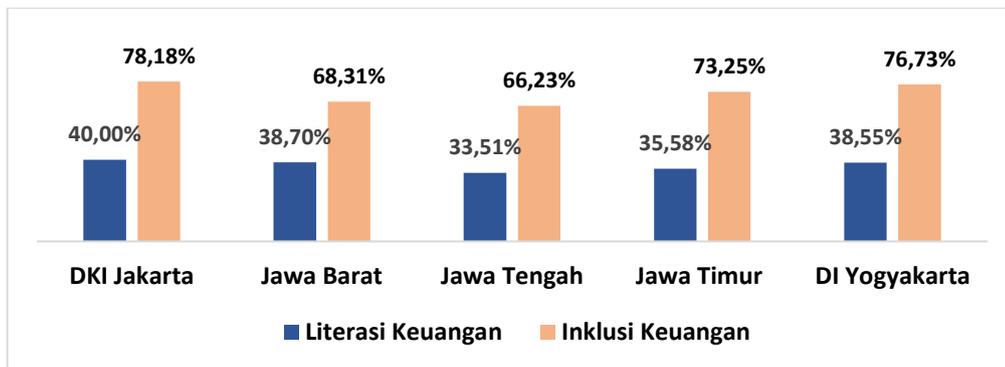
Gambar 1.4 Grafik Akses Masyarakat terhadap Keuangan Formal di Indonesia Tahun 2015

Sumber : Data Diolah, MPSJKI OJK 2015-2019

Berdasarkan gambar 1.4 dari MPSJKI OJK (2015-2019) menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap keuangan formal di Indonesia hanya mencapai 40%. Hal ini menyebabkan Indonesia menduduki tingkat kedua paling rendah dibandingkan dengan 5 negara ASEAN lainnya, yaitu Filipina sebesar 31,3%, Thailand sebesar 78,1%, Malaysia sebesar 80,7%, dan Singapura sebesar 96,4%. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan lembaga non-keuangan sebagai sumber pendanaan.

Menurut Kementerian Keuangan RI (2015) survei yang dilakukan Global Findex pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dewasa diatas 15 tahun yang mempunyai akun di berbagai lembaga keuangan mencapai 35,9%. Dari data tersebut, sekitar 69,3% penduduk dewasa di Indonesia terlayani jasa simpanan

dan memiliki tabungan dalam berbagai bentuk. Namun, hanya sekitar 26,6% yang memiliki rekening tabungan pada lembaga keuangan formal. Sisanya memiliki tabungan dalam skema informal, seperti tabungan dalam kelompok menabung atau dititipkan kepada orang lain di luar keluarga. Jika dibandingkan dengan target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah sebesar 75% pada tahun 2019 (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2016), angka 26,6% dianggap masih jauh dari target. Oleh karena itu, OJK membuat prioritas sasaran kelompok masyarakat seperti karyawan, pelajar/mahasiswa dan pemuda yang termasuk dalam usia produktif untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).



Gambar 1.5 Grafik Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Provinsi 2016

Sumber : Data Diolah, Otoritas Jasa Keuangan 2017

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 40% dan inklusi keuangan sebesar 78.18%, yang merupakan provinsi dengan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan tertinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Berdasarkan gambar 1.3, tingkat inklusi keuangan pada sektor pasar modal di Indonesia masih tergolong rendah yaitu hanya sebesar 1,25%. Hal ini didukung dengan data dari KSEI (2016) menyatakan bahwa provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan total investor tertinggi di tahun 2015 dan 2016, sebesar 165.373 SID dengan jumlah investor aktif 59.285 SID. Data berikut jika dibandingkan

dengan keseluruhan jumlah penduduk DKI Jakarta, jumlah investor di DKI Jakarta hanya sekitar 2,38% dari jumlah penduduk DKI Jakarta, yang menandakan bahwa inklusi keuangan di DKI Jakarta masih tergolong rendah.

Data dari BPS DKI Jakarta (2016) penduduk yang mendominasi DKI Jakarta adalah penduduk usia produktif dengan rentang usia 15-55 tahun yaitu sebesar 6.584.841 jiwa. Banyaknya usia produktif di DKI Jakarta disebabkan oleh para pencari kerja dari daerah yang menjadikan kota tujuan untuk mencari pekerjaan (Kompasiana.com, 2016). Fenomena-fenomena yang telah dipaparkan diatas, dapat menjelaskan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi, hal ini belum membuktikan bahwa masyarakatnya sudah memiliki literasi yang tinggi pula karena perilaku konsumtif masyarakat usia produktif DKI Jakarta masih tinggi. Selain itu, sama dengan tingkat literasi keuangannya DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat inklusi keuangan tertinggi. *Fintech* diharapkan dapat membantu meningkatkan tingkat inklusi keuangan karena mudah dan terjangkau (Liputan6.com, 2019). Namun pada kenyataannya banyak dari penduduk DKI Jakarta yang menggunakan *fintech-fintech* ilegal dalam meminjam uang, bukannya meningkatkan tingkat inklusi keuangannya tetapi berdampak pada banyak korban yang terkena intimidasi (Cnnindonesia.com, 2018). Sehingga kelompok usia produktif terutama di DKI Jakarta patut untuk dijadikan objek penelitian karena tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan mereka belum menggambarkan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang baik.

Berbagai upaya untuk mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan telah dilakukan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Menurut Siaran Pers OJK (2017) beragam kegiatan edukasi dan program inklusi keuangan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh OJK bersama industri jasa keuangan. Edukasi keuangan dilakukan dalam berbagai

bentuk seperti edukasi komunitas, *training of trainer*, *outreach* program, kuliah umum, edukasi bahari, iklan layanan masyarakat, *education expo*, bioskop keliling, wayangan dan SiMOLEK (Si Mobil Literasi Keuangan).

Lebih terfokusnya OJK terhadap usia produktif yang di dominasi oleh usia muda, membuat OJK berupaya memberikan edukasi kepada pelajar dan mengenalkan pentingnya pengetahuan tentang jasa keuangan. Serta mulai memanfaatkan jasa keuangan dari usia sekolah dengan menabung dan berinvestasi, sehingga dapat membentuk *financial habit* sejak dini (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Hal ini pun didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan enam pilar pendukung, yaitu Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Keuangan Publik, Pilar Pemetaan Informasi Keuangan, Pilar Kebijakan/Peraturan Yang Mendukung, Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Pilar Perlindungan Konsumen (Investor Daily, 2017).

Selain itu dalam pelaksanaannya, guna meningkatkan inklusi keuangan program perluasan akses keuangan, seperti Laku Pandai, Jaring dan Laku Mikro, maupun melalui pengembangan produk mikro, seperti tabungan SimPel, asuransi mikro, reksadana mikro, yuk nabung saham dan nabung emas telah direalisasikan. OJK sebagai anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif juga menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan dalam bentuk sinergi aksi bersama-sama kementerian/lembaga terkait, seperti pengembangan Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat, Sinergi Aksi Mendorong Akses Keuangan Untuk Rakyat, Gerakan Nasional Menabung dan program penyaluran bansos secara non tunai (Siaran Pers OJK, 2017).

Program-program yang telah direncanakan dan direalisasikan sampai saat ini belum memiliki dampak yang signifikan, karena berdasarkan Gambar 1.2 dan Gambar 1.3 tingkat literasi dan tingkat inklusi di Indonesia masih berada di tingkat bawah jika dibandingkan dengan 5 negara ASEAN, terutama Singapore yang sudah mencapai 90% (Radio Republik Indonesia, 2017). Hal inilah yang harus menjadi

perhatian serius bagi OJK agar dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait lainnya, salah satunya adalah dengan modal sosial.

Menurut inisiatif modal sosial Bank Dunia, modal sosial adalah koherensi sosial dan budaya internal masyarakat, norma-norma dan nilai-nilai yang ada diantara orang-orang dan lembaga-lembaga dimana mereka berada (Kamukama & Natamaba, 2013). Putnam dalam (Bongomin *et al.*, 2016) menjelaskan bahwa modal sosial dapat berpengaruh positif terhadap pendidikan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini juga selaras dengan modal sosial yang dapat memfasilitasi edukasi keuangan berupa pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Modal sosial juga berperan penting dalam memediasi dan meningkatkan berbagai sumber daya termasuk pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan masyarakat sebagai *driver* literasi keuangan (Bongomin *et al.*, 2016).

Contoh pengembangan modal sosial pada era digital saat ini adalah dengan komunitas *online* seperti kaskus forum. Dengan kaskus forum tiap individu dapat memperluas *network*, berbagi informasi dan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki hobi atau latar belakang yang sama (Kompas.com, 2014). Salah satu bentuk topik pembicaraan yang dibahas dalam kaskus forum adalah forum perencanaan keuangan dari NgaturDuit.com. Dalam forum tersebut membahas tentang bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar, para anggota forum pun diperbolehkan untuk bertanya atau berdiskusi tentang perencanaan keuangan. Misi dari forum tersebut adalah untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia (Kaskus.co.id, 2015).

Di Jakarta, terdapat beberapa modal sosial yang ikut mendukung dan terlibat dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan salah satunya adalah Kocek. Komunitas Cerdas Keuangan (Kocek) merupakan komunitas yang menjadi wadah untuk belajar, dan berbagi tentang pengetahuan keuangan, tips dan informasi kepada masyarakat. Salah satu program kerjanya adalah *School of Innovations: Smart Financial Planning for Youth* berupa *workshop* untuk menjadi *financial*

trainer yang ideal, handal, dan mampu *deliver* informasi dengan baik (Cerdas Keuangan, 2013).

Modal sosial lainnya yang ada di DKI Jakarta adalah *Save The Children* yang memiliki program *Skills to Succeed (S2S)* yang befokus pada pelajar dan *millenials*, The Wahid Institute dengan program *Training of Trainer (ToT)* Fasilitator Pendidikan Keuangan yang berfokus pada guru, Investor Saham Pemula (ISP) dengan program *Sharing & Diskusi Online* Tentang Pasar Modal dengan target pelajar dan *millenials*, dan Pusat Pengembangan Wanita (PPSW) Jakarta yang memiliki program Pendidikan Keuangan Bagi Perempuan Usia Matang di Jakarta yang berfokus pada perempuan dan ibu rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari modal sosial yang ada di DKI Jakarta bergerak di bidang edukasi keuangan. Fokus dari tiap programnya pun berbeda-beda, mulai dari pelajar, perempuan, guru bahkan sampai *millennials*. Dari program-program tersebut, terlihat bahwa sasarannya pun beragam dan tidak terspesifik, maka menurut penulis sasaran dari tiap modal sosial tersebut dapat dirangkum menjadi kelompok usia produktif. Meskipun OJK selama ini sudah berupaya untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, usia produktif perlu menjadi perhatian karena nantinya mereka akan menanggung usia yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang modal sosial, dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial merupakan mediator yang signifikan dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, terutama dalam mengakses layanan keuangan di masyarakat pedesaan Rural Uganda (Bongomin *et al.*, 2016). Menurut Kamukama & Natamba (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial secara parsial memediasi masyarakat untuk dapat mengakses ke layanan keuangan di Uganda. Penelitian-penelitian dahulu tersebut menjadi dasar pada penelitian ini.

Dengan demikian penulis berharap peran modal sosial dapat menjadi sarana penghubung yang akan mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi

keuangan pada masyarakat di DKI Jakarta, terutama penduduk usia produktif. Dari kajian fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Peran Modal Sosial sebagai Mediator Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada Usia Produktif di DKI Jakarta”.

1.3 Perumusan Masalah

Rendahnya literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat Indonesia terlebih pada usia produktif perlu mendapat perhatian. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang penduduknya didominasi oleh usia produktif yang terkenal dengan salah satu tujuan bagi para pendatang luar daerah dalam mencari pekerjaan.

Tingginya tingkat literasi dan inklusi keuangan DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, belum membuktikan bahwa masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai produk keuangan yang mereka gunakan dan penggunaan produk lembaga jasa keuangan yang tinggi. Dilihat dari tingkat kepemilikan kartu kredit pada usia produktif, DKI Jakarta mendapati tingkat kepemilikan tertinggi dibandingkan provinsi lain. Oleh karena itu, DKI Jakarta dapat dikatakan memiliki perilaku konsumtif yang tinggi. Selain itu, masih maraknya pinjaman dana di *fintech-fintech* ilegal membuktikan bahwa masyarakat Jakarta masih minim pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan lembaga keuangan formal masih sangatlah rendah. Selain itu, penggunaan terhadap jasa keuangan khususnya pasar modal masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI Jakarta.

Modal sosial nantinya diharapkan akan menjadi mediator dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, sehingga mampu membantu pemerintah dalam mendukung peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan khususnya pada usia produktif di DKI Jakarta. Beberapa studi terdahulu tentang modal sosial sebagai mediator literasi keuangan dan inklusi keuangan belum dilakukan di DKI Jakarta sebagai studi kasus. Dengan perbedaan geografi dan demografi tersebut maka studi kasus di DKI Jakarta perlu untuk diteliti.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap modal sosial?
- 2) Apakah modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan?
- 3) Bagaimana pengaruh modal sosial dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan terhadap inklusi keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, terbentuklah tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap modal sosial
- 2) Untuk mengetahui apakah modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal sosial dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan terhadap inklusi keuangan

1.6 Manfaat Penelitian

Luaran dari penelitian ini, yang terkait dengan peran modal sosial sebagai mediator literasi keuangan dan inklusi keuangan pada usia produktif di DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara aspek praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menjadi masukan dalam membuat program-program di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan khususnya di DKI Jakarta.

1.6.2 Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi khususnya di bidang *financial behavior*. Hal ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan pengetahuan terkait variabel dan mediasi yang digunakan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang berhubungan di masa mendatang.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Adapun sistematika penulisan tugas akhir untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi yang terdapat pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang penjelasan dari literatur penelitian yang berkaitan dengan teori penelitian yang mendukung solusi permasalahan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dilakukan yaitu variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan tentang analisis data yang berfokus pada hasil olahan data sesuai dengan metode yang digunakan. Interpretasi hasil analisis dari objek penelitian sesuai dengan pengujian yang digunakan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dipaparkan tentang kesimpulan dari analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat baik dan diterapkan oleh objek penelitian maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.